

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga. UMKM memiliki peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 Indonesia memiliki sekitar 65,5 juta UMKM, yang berkontribusi sebesar 99% dari total unit usaha. Sektor UMKM memberikan kontribusi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp 9.580 triliun, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, UMKM terbukti menjadi penyumbang terbesar yang merangsang pertumbuhan ekonomi negara, serta memberi kontribusi yang berperan krusial dalam mengambil tenaga kerja dan menekan jumlah pengangguran. Tak hanya itu, dampak positif dari UMKM juga merambah pada pemerataan pendapatan dan upaya pembrantasan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat di berbagai lapisan sosial.

Sektor UMKM sejatinya menjadi pendorong yang kuat untuk meningkatkan daya saing nasional Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi penggerak perekonomian, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi sektor industri dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Mendorong diversifikasi ekonomi adalah satu dari sekian banyak faktor yang tidak dapat dipisahkan dari peran UMKM, dengan menciptakan beragam kesempatan bisnis yang mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi sebanyak mungkin ekonomi di dalam negeri. Pemerintah dan lembaga terkait tentunya memiliki peran sentral dalam mendukung upaya pengembangan UMKM. Mereka harus dapat memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan, serta mendorongnya untuk berkontribusi lebih besar lagi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan peluang dan insentif yang memadai, seperti kemudahan akses ke pembiayaan,

penguatan kapasitas, fasilitas produksi, serta ketersediaan pasar yang luas. Keberlangsungan UMKM harus diperjuangkan bersama dan menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait. Hanya dengan menjaga dan memperkuat sektor tersebut, kemajuan dan perkembangan negara dapat terus meningkat ke arah yang positif.

Operasional UMKM tidak bisa dipisahkan dari praktik akuntansi, yang krusial dalam menggambarkan pertumbuhan atau situasi finansial mereka. Akuntansi memungkinkan pemantauan kelangsungan hidup UMKM dan memberikan dasar untuk evaluasi kinerja. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM ialah kegiatan usaha yang berfungsi untuk memperbesar kesempatan kerja serta menyediakan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. UMKM berperan penting untuk penyamaan pendapatan, menyokong perkembangan ekonomi, dan berkontribusi pada pencapaian stabilitas nasional. Dalam undang – undang tersebut juga dijelaskan tentang syarat yang dapat menggambarkan UKM yakni:

- 1) Usaha Mikro dengan total harta < Rp 50 juta, serta penjualan per tahun < Rp 300 juta
- 2) Usaha Kecil dengan total harta berkisar Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, serta penjualan per tahun antara Rp 300 juta hingga Rp 2.500. juta
- 3) Usaha Menengah dengan total harta berkisar Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar, serta penjualan per tahun berkisar Rp 2 milyar juta hingga Rp 50 milyar

UMKM sebagai satu di antara pondasi utama dalam perekonomian nasional dan harus mendapatkan kesempatan, dorongan, penjagaan, serta pertumbuhan yang maksimal. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan yang jelas terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, meskipun peranan Usaha Besar dan BUMN juga penting. Di Indonesia, industri atau pabrik termasuk bentuk UMKM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 menjelaskan industri didefinisikan sebagai aktivitas perekonomian yang membentuk bahan baku, barang sebelum jadi, menjadi produk yang bernilai tinggi. Ini termasuk desain konstruksi dan pengembangan industri.

Kompetisi sektor industri untuk memberikan barang bermutu tinggi tambah intens. Oleh karena itu, UMKM harus berusaha menjadi semakin produktif dan efektif saat proses produksi supaya barang yang diberikan berkualitas tinggi dan

dapat dijual dengan harga yang sesuai di pasar. Disamping itu, masing-masing instansi perlu memiliki penyajian keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan ini penting untuk mengidentifikasi penghasilan yang didapatkan, pengeluaran setiap bulan atau tahunnya, serta untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan sangat berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya, informasi tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan baku serta investasi dalam peralatan yang diperlukan, menetapkan harga jual produk secara kompetitif, mengajukan pinjaman kepada bank, pelatihan karyawan, merencanakan pembelian atau investasi dalam aset tambahan (Amatullah Azizah Rachmanti and Hariyadi 2019). Pelaporan keuangan yang terstruktur akan membantu para UMKM dalam menilai keadaan usaha mereka secara efektif.

Biarpun UMKM sangat berperan penting dalam sektor ekonomi nasional, mereka masih mendapatkan berbagai tantangan, salah satunya dalam hal penyusunan laporan keuangan. Potensi tinggi UMKM dalam pertumbuhan sektor ekonomi belum sepenuhnya dibarengi dengan mutu UMKM itu sendiri. Kualitas UMKM seringkali dipengaruhi oleh catatan dan pengaturan finansial yang efektif, yang merupakan faktor kunci dalam kesuksesan UMKM. Isu mendasar yang dihadapi UMKM adalah ketidakmemadaan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini sering disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai pencatatan akuntansi. Umumnya, penyampaian laporan UMKM hanya mendata banyak barang yang masuk dan keluar, yang dibeli maupun dijual, serta piutang dan utang, tanpa mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

Padahal, informasi akuntansi yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan, seperti dalam hal pembelian bahan baku dan alat produksi, penentuan harga, pengajuan pembiayaan ke bank, pengembangan sumber daya manusia, dan penambahan aset usaha. Laporan keuangan yang sistematis memudahkan pelaku UMKM dalam mengevaluasi kondisi usaha dan meningkatkan kualitas operasional mereka. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pelaku UMKM perlu

memahami sistem pencatatan akuntansi dengan baik, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, dan menerapkan sistem pencatatan yang sesuai. Informasi keuangan yang akurat dan terstruktur merupakan hasil akhir dari pencatatan akuntansi dan merupakan alat penting bagi pihak berkepentingan untuk mendukung perkembangan usaha.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya perubahan dalam penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Agar terpenuhinya keperluan pelaporan keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018 yang berfungsi untuk menyederhanakan dan menyesuaikan proses pelaporan keuangan agar lebih relevan dengan ukuran dan kompleksitas UMKM di Indonesia. SAK EMKM ialah serangkaian regulasi dan panduan yang digunakan dalam proses akuntansi untuk EMKM. Standar ini diterbitkan dalam rangka menyediakan panduan yang jelas dan konsisten saat menyusun laporan keuangan entitas tersebut. Mengikuti standar ini akan membantu entitas untuk menjalankan praktik akuntansi yang tepat, transparan, dan taat akan regulasi yang ditetapkan. Dengan adanya SAK EMKM, entitas dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka dan dapat memperoleh sinyal yang tepat dan relevan untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis. Penerapan SAK EMKM bertujuan untuk mencapai keperluan spesifik EMKM dalam penyusunan laporan akuntansi. Standar ini mencakup berbagai topik, seperti pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, pengukuran aset dan kewajiban, serta penyajian laporan akuntansi. Melalui pedoman yang tepat dan terstruktur, entitas dapat menghindari kesalahan dalam proses akuntansi dan menghasilkan laporan hasil keuangan yang tepat dan dapat dipercaya. Selain memberikan panduan dalam akuntansi, SAK EMKM berfungsi untuk menambah transparansi serta akuntabilitas entitas. Standar ini mendorong entitas dalam proses penyusunan laporan hasil keuangan untuk menyajikan informasi yang relevan, lengkap, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna laporan hasil keuangan, seperti penanam modal, penyalur kredit, dan instansi berwenang, dapat memberikan keputusan dengan lebih tepat sesuai laporan yang tersedia. SAK

EMKM juga mendukung harmonisasi akuntansi di tingkat nasional dan internasional. Standar ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diakui secara internasional, sehingga memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar entitas yang berbeda. Hal ini juga membantu entitas untuk beroperasi secara lintas negara dan menghadapi persaingan global dengan lebih baik.

Dalam perkembangannya, SAK EMKM terus mengalami revisi dan penyempurnaan agar dapat tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan regulasi keuangan. Entitas diharapkan selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menerapkan SAK EMKM. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi perubahan lingkungan bisnis dengan lebih siap dan dapat memanfaatkannya sebagai peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, SAK EMKM memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi EMKM dalam menjalankan praktik akuntansi yang terpercaya. Dengan mengikuti standar ini, entitas dapat meningkatkan kredibilitas, kepercayaan, dan nilai bisnis mereka di mata para pemangku kepentingan (Herawati et al. 2024). UMKM memperoleh kemudahan dengan adanya SAK EMKM yang diterbitkan oleh IAI dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam menerapkan akuntansi pada usaha mereka dengan cara yang lebih sederhana, sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Meskipun tampak sederhana, SAK EMKM tetap mampu memberikan informasi yang handal dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi keuangan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan UMKM. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) EMKM ialah lembaga yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan memenuhi definisi serta kriteria UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku di Indonesia.

Penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan hasil keuangan dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sama seperti yang diterapkan pada entitas lain yang lebih besar, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Ini penting agar semua pihak memahami signifikansi laporan keuangan dalam usaha. Namun, banyak UMKM di Indonesia yang belum

mempraktikkan akuntansi dengan baik dalam pencatatan keuangan mereka. Banyak dari mereka menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan karena SAK umum bisa terasa rumit dan sulit diterapkan untuk usaha kecil menengah. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM sangat penting, karena standar ini dirancang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan prinsip kesederhanaan yang diusung SAK EMKM, diharapkan UMKM dapat lebih mudah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, mendukung pertumbuhan dan kontribusi mereka dalam perekonomian Indonesia yang sangat penting.

Diterapkannya SAK EMKM pada UMKM, diingkan supaya mendorong perkembangan UMKM dalam perekonomian Indonesia. SAK EMKM memberikan kemudahan bagi UMKM karena ketentuan pelaporannya dirancang untuk mudah dipahami dan diterapkan. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana dan sesuai untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, sehingga memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, ada juga SAK ETAP, yang ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk dalam kategori ini karena mereka umumnya tidak terlibat dalam pasar modal dan tidak diwajibkan melaporkan kinerja keuangan mereka kepada publik secara luas. SAK ETAP menyediakan panduan yang lebih sederhana untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan dibandingkan dengan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Namun, SAK ETAP memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan SAK EMKM. Meskipun SAK ETAP lebih sederhana daripada standar akuntansi umum, kompleksitasnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan SAK EMKM. Hal ini menjadikannya kurang ideal untuk usaha mikro dan kecil yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan pemahaman akuntansi. Selain itu, SAK ETAP tidak secara khusus dirancang untuk UMKM, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik dan kebutuhan spesifik mereka. disamping itu, penerapan SAK ETAP sering memerlukan dukungan dari profesional akuntansi, yang dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP juga lebih kompleks dan mendalam, yang bisa menjadi tantangan bagi

UMKM dengan sistem informasi akuntansi yang sederhana. Secara keseluruhan, SAK ETAP tidak sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan UMKM, sedangkan SAK EMKM dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana, relevan, dan praktis. Ini membuat SAK EMKM lebih mudah diimplementasikan dan lebih efisien bagi UMKM. Dengan demikian, SAK EMKM lebih mudah dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan SAK ETAP, berkat kesederhanaan dan kesesuaiannya dengan karakteristik UMKM. SAK EMKM memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Informasi ini bermanfaat bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak dalam posisi untuk meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Laporan keuangan menurut SAK EMKM mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan prinsip kesederhanaan yang diterapkan dalam SAK EMKM, diharapkan UMKM dapat dengan mudah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan pengelolaan usaha mereka.

Biarpun SAK EMKM telah diluncurkan, tetapi masih terdapat banyak UMKM yang kurang lumrah terkait dampak yang baik untuk usahanya dan belum juga memahami standar tersebut salah satunya UMKM yang ada di Buleleng. Saat ini, jumlah UMKM per tahun 2023 yang ada di Provinsi Bali khususnya pada Kabupaten Buleleng mencapai 79.470 yang dimana angka tersebut masih tergolong kecil untuk mengurangi angka persentase pengangguran yang ada di Bali. Beberapa program yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Buleleng yang salah satunya, yaitu dengan dibangunnya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Buleleng berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Singaraja. Saat ini, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mencapai 79.470 dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha**  
**Di Kabupaten Buleleng Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Klasifikasi Usaha</b>	<b>Formal</b>	<b>Informal</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Usaha Mikro	23.589	43.390	66.979
2.	Usaha Kecil	5.789	5.992	11.781
3.	Usaha Menengah	387	9	396
4.	Usaha Besar	314	-	314
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>30.079</b>	<b>49.391</b>	<b>79.470</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng*

Pada table dapat dilihat bahwa usaha mikro ialah jenis usaha dengan minat yang paling tinggi dari warga di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut dikarenakan bermacam penyebab, di antaranya ialah tingginya minat generasi muda untuk berwirausaha dan mendirikan usaha sebagai pelaku UMKM. Hanya saja, hal ini tentunya belum diimbangi dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang padahal hasil dari pencatatan yang telah dilaksanakan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan laba rugi dari usaha yang didirikan. Setiap pendiri usaha diperlukan untuk menyajikan laporan hasil keuangan atau pengendalian finansial yang baik. Adanya laporan atau pengelolaan keuangan sebagai prosedur yang bisa diterapkan para pengusaha untuk mengetahui keadaan dan kondisi finansial dalam berusaha. Disamping itu, analisis laporan keuangan sangat mempermudah upaya perbandingan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Evaluasi kinerja keuangan perusahaan sering kali menggunakan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Untuk mengevaluasi laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu usaha, teknik yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Teknik ini membantu dalam menilai dan memahami berbagai aspek keuangan perusahaan dengan membandingkan rasio-rasio tertentu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memantau kinerja dari waktu ke waktu.

Menelaah rasio finansial sangat penting bagi para pendiri usaha, karena melalui analisis ini mereka dapat memahami kondisi keuangan usaha secara mendetail. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi pedoman bagi pengusaha untuk menilai kinerja keuangan perusahaan serta untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Selain itu, informasi ini juga membantu dalam menentukan tindakan dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan perusahaan di

masa depan. Sejak Indonesia menetapkan PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang kewajiban bagi usaha kecil untuk mencatat akuntansi dengan baik, tetapi di lapangan, mayoritas pengusaha UMKM belum melaksanakan pencatatan akuntansi sesuai standar yang ada.

Di Kabupaten Buleleng, masih ada mayoritas UMKM yang belum menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Salah satu contohnya adalah UMKM Keripik Pare Nando, yang masih belum menerapkan pembukuan sesuai dengan standar SAK EMKM. Keripik Pare Nando merupakan suatu usaha yang menggeluti bidang usaha makanan, yang memulai usahanya dari tahun 2020. Pada usaha ini, hanya menggunakan pencatatan keuangan secara sederhana. Penyusunan laporan hasil keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM adalah hal yang krusial untuk dilakukan, yaitu agar dapat mengetahui informasi terkait keuangan yang ada pada usaha tersebut. Hanya saja, pencatatan laporan keuangan dengan buku kas secara manual keakuratannya masih belum dapat dipastikan. Penerapan laporan keuangan pada UMKM yang masih belum menerapkan pelaporan sesuai SAK EMKM sering kali masih menghadapi berbagai kendala. UMKM yang masih menggunakan metode manual dalam pencatatan transaksi keuangan, seperti mencatat di buku kas atau spreadsheet sederhana, yang rentan terhadap kesalahan dan kurang akurat. Pencatatan secara sederhana yang disusun oleh UMKM ini tidak lengkap dan kurang detail, sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan UMKM secara akurat. Informasi penting seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya seringkali tidak tercatat dengan benar. Laporan yang tidak relevan terhadap patokan Akuntansi dan tidak mengikuti konsep-konsep akuntansi yang diatur pada SAK EMKM, sehingga sulit untuk dibandingkan dan dievaluasi secara objektif oleh pihak eksternal seperti pihak bank.

Permasalahan itu disebabkan karena berbagai hal, yakni pemilik masih tidak sadar akan peran krusial penyajian laporan finansial. Pemilik UMKM Keripik Pare Nando sering kali fokus pada operasional sehari – hari dan pemasaran, sehingga penyusunan laporan keuangan sesuai standar tidak menjadi prioritas utama. Disamping itu UMKM juga biasanya kurang memanfaatkan teknologi akuntansi

modern, sehingga proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Kurangnya informasi dalam pendidikan dari pihak – pihak terkait seperti pemerintahan atau asosiasi bisnis, tentang pentingnya dan cara penerapan SAK EMKM. Kurangnya insentif atau sanksi dari pihak regulator untuk penerapan standar Akuntansi membuat pemilik usaha tidak merasa perlu untuk mematuhi. Laporan finansial yang tidak relevan terhadap SAK EMKM memiliki beberapa implikasi untuk UMKM sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa implikasi dari penggunaan laporan finansial yang tidak relevan dengan acuan akuntansi keuangan:

#### 1. Implikasi Terhadap Pengelolaan Internal

- Pengambilan Keputusan: Pemilik usaha mungkin tidak dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau peluang untuk ekspansi
- Manajemen Keuangan: UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan kewajiban lainnya.

#### 2. Implikasi Terhadap Hubungan Eksternal

- Mendapatkan Pembiayaan : Bank atau investor memerlukan laporan keuangan yang sesuai standar untuk menilai kelayakan kredit atau investasi.
- Kepatuhan Pajak: Laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak, mengundang audit, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Melalui penerapan pelaporan akuntansi para pengusaha bisa dapat mempelajari kesehatan usahanya. Karenanya, penelitian ini lebih memfokuskan untuk mengkaji beberapa hal yang diduga berpengaruh terhadap kesulitan penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM Keripik Pare Nando yang ada di Kabupaten Buleleng. Semakin kompleks kegiatan yang ada pada UMKM tersebut, maka semakin penting pula dilaksanakannya pencatatan laporan keuangan untuk diterapkan. Adapun data dari berbagai sektor-sektor UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2023, yaitu terlihat pada tabel ini:

**Tabel 1. 2**  
**Sektor UMKM Di Kabupaten Buleleng Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Sektor</b>	<b>Formal</b>	<b>Informal</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Perdagangan	15.925	36.789	52.714
2.	Perindustrian	4.129	6.453	10.582
3.	Pertanian Non Pertanian	2.218	2.452	4.670
4.	Aneka Jasa	7.807	3.697	11.504
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>30.079</b>	<b>49.391</b>	<b>79.470</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng*

Dilihat dari pengamatan yang dilakukan, UMKM Keripik Pare Nando adalah salah satu dari 52.714 usaha di sektor perdagangan yang berada di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. UMKM Keripik Pare Nando, yang bergerak di bidang produk makanan, belum menerapkan sistem akuntansi yang baik seiring berjalannya waktu. Proses akuntansi yang diterapkan hanya mencakup catatan sederhana yang sesuai dengan wawasan pemilik usaha. Contohnya termasuk pencatatan pembelian bahan baku dan kebutuhan produksi, pencatatan penjualan hasil produksi kepada pelanggan, serta pencatatan persediaan hasil produksi di gudang. Tentunya membuat UMKM Keripik Pare Nando belum tepat untuk menyusun laporan finansial agar relevan dengan SAK EMKM. Disamping itu omzet usaha Keripik Pare Nando masih terbilang rendah, rendahnya omzet usaha dapat mempengaruhi kemampuan usaha untuk mendapatkan pembiayaan eksternal seperti pinjaman bank. Bank dan lembaga keuangan lainnya sering mempertimbangkan omzet sebagai salah satu faktor penentu dalam memberikan pinjaman.

UMKM Keripik Pare Nando menghadapi kendala ketika ingin menambah modal untuk usahanya, terutama terkait dengan pelaporan keuangan yang menjadi persyaratan dalam mengajukan pinjaman. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi mereka dalam memperoleh pinjaman yang dibutuhkan. Ditambah persepsi bahwa laporan keuangan tidak terlalu penting untuk usahanya. Lemahnya informasi keuangan yang tidak memadai, sehingga pemilik tidak bisa memenuhi syarat dalam

pengajuan modal ke pihak kreditur maupun perbankan. Tanpa adanya laporan keuangan yang standar UMKM tidak dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan secara efektif untuk pengambilan keputusan. Dengan menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, diharapkan UMKM Keripik Pare Nando dapat menggunakan laporan tersebut sebagai alat evaluasi usaha serta dasar untuk pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu dalam merencanakan dan mengembangkan usaha secara strategis.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, peneliti terdorong untuk mengkaji studi berjudul “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Di Buleleng (Studi Kasus UMKM Keripik Pare Nando)”. Tujuan dari diangkatnya judul tersebut untuk menganalisis penerapan SAK EMKM pada UMKM Keripik Pare Nando, meskipun banyak studi terdahulu pada pelaksanaan SAK EMKM, studi ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada UMKM di daerah spesifik ini dan menggali detail operasional yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Selain itu, agar pemilik UMKM memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada, laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai syarat dalam mengajukan pinjaman modal ke pihak eksternal jika diperlukan di masa depan serta dari adanya penelitian ini juga merupakan lanjutan atau referensi tambahan yang dapat berguna untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengembangkan kembali penelitian yang telah ada, sehingga nantinya akan terdapat keberlanjutan dari penelitian ini yang kemudian hari akan dapat sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis serta masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam konteks ini, terdapat permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu UMKM yang menghadapi kesulitan dalam pengadopsian SAK EMKM sebagai alat dalam menyusun laporan hasil keuangan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan dampak laporan hasil keuangan yang akurat. Melalui penyusunan laporan hasil keuangan yang benar dan relevan dengan acuan yang berlaku, UMKM dapat mengatur anggarannya lebih baik. Hal ini juga mempermudah UMKM dalam mengajukan pinjaman dana kepada pihak eksternal.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengacu pada permasalahan yang ditemukan, untuk memperoleh hasil penelitian yang menghindari penafsiran yang tidak diinginkan, maka studi ini akan difokuskan pada UMKM di sektor makanan, dengan studi kasus pada Keripik Pare Nando, yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan finansial sesuai format laporan finansial di SAK EMKM. Pembatasan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan penyampaian laporan hasil keuangan melihat dari acuan SAK EMKM di sektor perdagangan

### **1.4 Rumusan Masalah**

Merujuk pembahasan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan dan penyampaian laporan keuangan yang dibuat pada UMKM Keripik Pare Nando?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh UMKM Keripik Pare Nando dalam penerapan SAK EMKM untuk penyusunan laporan keuangan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Merujuk pokok permasalahan sebelumnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyusunan laporan keuangan yang dibuat pada UMKM Keripik Pare Nando.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh UMKM Keripik Pare Nando dalam penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Studi ini diinginkan dapat memberikan dampak baik secara akademis maupun praktis kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, yakni:

#### **1. Manfaat Akademis**

- 1) Studi ini diinginkan dapat menjadi referensi bagi peneliti mendatang, terutama dalam bidang akuntansi dan penggunaan SAK EMKM bagi UMKM.

- 2) Temuan ini diinginkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi.
- 3) Studi ini diinginkan agar menjadi acuan dalam praktik penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM, terutama di Buleleng.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Peneliti

Untuk bahan literatur bagi peneliti untuk secara langsung agar dapat memahami perbedaan antara teori yang telah dipelajari dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

### 2) Bagi Lembaga Pendidikan

Temuan ini bisa menjadi tambahan referensi pada materi perkuliahan yang berkaitan dengan SAK EMKM serta pengusaha UMKM.

### 3) Bagi Pihak UMKM

Studi diinginkan sebagai dasar pertimbangan terkait penggunaan SAK EMKM oleh UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memahami pentingnya laporan hasil keuangan ini dan penerapannya dalam usaha, sehingga dapat mengembangkan bisnis mereka di masa depan.

